

**PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB KONVERGENSI IFRS**

**(Studi pada perusahaan Manufaktur tahun 2012-2013)**

**THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE TO THE LEVEL OF  
COMPLIANCE TO IFRS CONVERGENCE MANDATORY DISCLOSURE**

**(Study on Manufacturing in 2012-2013)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi  
Program Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Oleh

**Wijayanti**

**20110420103**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2014**

# **PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB KONVERGENSI IFRS**

**Wijayanti**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

## **Abstract**

The aim of this study was to obtain empirical evidence about the influence of corporate governance structure as measured from the number of commissioners, the proportion of independent directors, the number of board meetings, the background of the board of commissioners, the number of audit committee and the number of audit committee meetings on the level of compliance with mandatory disclosure of IFRS convergence.

Disclosure of risk is measured by using the method of content analysis approach of the sentence. The population in this study are 131 companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2012 and 2013. Data were obtained from annual reports and financial statements of the manufacturing company based on purposive sampling method, the results showed that the samples are obtained as many as 120 companies. This hypothesis was tested using regression analysis models.

The results of this study showed that the average compliance rate of convergence of IFRS disclosure of 39.70% is very low compared to foreign companies that are already used to apply IFRS-based standards are average at 79.00% in Jordan and 60.989% in Ghana. It shows that overall the independent variables studied did not have a significant effect on the level of compliance with convergency mandatory disclosure IFRS.

**Keywords:** The structure of corporate governance, disclosure compliance rate, Convergence of IFRS, the Company Manufacturing.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, dan masih akan terus berlanjut, implementasi *International Financial Report Statement* (IFRS) merupakan topik yang banyak dibahas oleh para pemerhati dan peneliti di berbagai negara termasuk di Indonesia. Sejak menetapkan diri melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi yang berbasis internasional, dewan standar Indoneisa telah melakukan berbagai kali revisi baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar yang baru. Laporan keuangan yang disusun berdasar Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) untuk tahun mulai 1 januari 2012 akan mirip secara substansial dengan laporan keuangan yang disusun berdasar IFRS. Perkembangan implementasi IFRS di Indonesia juga terekam di literature, *ceklis* PWC 2013 mendeskripsikan perkembangan terkini adopsi IFRS di Indonesia.

Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor menurut penelitian Pitasari (2013). Untuk melindungi kepentingan stakeholders ini diperlukan adanya peraturan tentang pengungkapan wajib dalam laporan keuangan karena tanpa peraturan ini dapat membuat

perusahaan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan menurut Prawinandi et al., (2012).

Menurut Gamayuni dalam Pitasari (2013), semua perusahaan go public dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012. Perusahaan yang menerapkan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS maka diwajibkan untuk melakukan pengungkapan penuh (*Full Disclosure*). Pengungkapan dilakukan dengan membuat laporan keuangan atau laporan tahunan (*Annual Report*). Pengungkapan dalam annual report merupakan salah satu isu penting di dunia pasar modal. Annual report merupakan salah satu sumber utama informasi keuangan bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi terutama oleh pemegang saham dan investor untuk menentukan tujuan investasi mereka.

*Mandatory disclosure* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra et al., dalam Prawinandi dkk., 2012).

Adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di pasar modal menjadi bukti bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap pengungkapan wajib masih kurang, terutama pada laporan laba rugi, misalnya kasus *mark-up* laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk yang *overstated*, yaitu laba pada laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132,000 miliar sehingga terjadi penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (Syahrul dalam Utami dkk., 2012). Manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk terjadi karena lemahnya penerapan *corporate governance*. Kasus PT Kimia Farma, Tbk ini mengindikasikan pentingnya pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Pengungkapan wajib dalam laporan keuangan telah diatur dalam standar akuntansi internasional yaitu IFRS. Semua perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS (*Internasional Financial Reporting Standards*) untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012 (Gamayuni dalam Prawinandi dkk., 2012).

Penelitian ini replikasi dari penelitian Anggita Pitasari yang dilakukan tahun 2013 yaitu Analisis Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan adalah perbedaan tahun penelitian dan sampel. Penelitian Pitasari (2013) menggunakan tahun sampel 2010-2012 pada perusahaan jasa sementara penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 dan 2013 dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaan yang lain yaitu sampel dari penelitian ini menambahkan latar belakang pendidikan komisaris karena latar belakang pendidikan dewan komisaris merupakan faktor yang menentukan *social disclosure* dalam *annual report* perusahaan. Objek penelitian ini

adalah laporan tahunan dan laporan keuangan terutama berfokus pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan yang selalu diperhatikan oleh *stakeholders* dalam *annual report* sebagai pedoman mereka dalam mengambil keputusan. Selain itu, laporan laba rugi komprehensif juga menggambarkan kinerja perusahaan dalam satu periode pelaporan.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Batasan dalam penelitian ini, perusahaan yang diteliti adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012 dan 2013. Pengaruh struktur *Corporate Governance* dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris. jumlah anggota komite audit, dan jumlah rapat komite audit.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?
3. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?
4. Apakah latar belakang pendidikan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS?
5. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?

6. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris, rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan, jumlah anggota komite dan jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Obyek/Subyek Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian yang diteliti yaitu mencakup data pada tahun 2012 dan 2013. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu dan diperoleh sampel yang sesuai sebanyak 120 (dua tahun) dan sumber data diperoleh dari situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **B. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012 dan 2013.

### **C. Teknik Pengambilan Sampel**

Adapun kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat dijadikan sampel adalah sebagai berikut :

1. Merupakan perusahaan sector manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2013.
2. Memiliki kekelengkapan informasi laporan keuangan dan laporan tahunan yang dibutuhkan dalam penelitian yang telah diaudit dan dipublikasikan dan dapat diakses melalui internet.
3. Sampel adalah emiten yang memiliki tahun buku per 31 desember
4. Perusahaan sampel tidak mengalami delisting selama periode pengamatan.

#### **D. Definisi Operasional Variabel penelitian**

##### **1. Variabel Dependen**

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Identifikasi item pengungkapan dilakukan dengan menggunakan Deloitte IFRS Presentation and Disclosure Checklist yang diperoleh dari situs *www.iasplus.com*. Beberapa item dipilih dari checklist tersebut dan disesuaikan dengan PWC yang berlaku di Indonesia dan penerapannya wajib pada tahun 2012 dan 2013.

Pengukuran variabel pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif menggunakan teknik scoring, yaitu jika item yang perlu diungkapkan dapat diterapkan (*applicable*) dalam perusahaan dan item tersebut diungkapkan oleh perusahaan diberi skor 1, jika item tersebut tidak diungkapkan diberi skor 0, dan jika item tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan akan diberi tanda N/A (*Not Applicable*). Tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS dalam penelitian ini diperoleh dengan membagikan total klasifikasi *item* tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* perusahaan dengan Jumlah seluruh kriteria *item* checklist pengungkapan yang telah di

tetapkan PWC yang sudah konfergensi IFRS yaitu 109 *item* pengungkapan untuk perusahaan manufaktur.

## 2. Variabel Independen

### a. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota dewan komisaris adalah banyaknya anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007 dalam Prawinandi dkk., 2012). Jumlah anggota dewan komisaris diukur dengan jumlah komisaris dari pihak yang terafiliasi (memiliki hubungan, salah satunya pihak internal perusahaan) dan tidak terafiliasi (tidak memiliki hubungan) dengan perusahaan (KNKG, 2006 dalam Prawinandi., 2012). Cara mengukur anggota dewan komisaris dengan menjumlah total anggota dewan komisaris.

### b. Proporsi Komisaris Independen

Proporsi komisaris independen adalah perbandingan jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak terafiliasi) dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Haniffa dan Cooke, 2005 dalam Prawinandi dkk., 2012), dimana ukuran yang digunakan oleh Haniffa dan Cooke (2005) dalam Prawinandi dkk., (2012) adalah dengan membagi jumlah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris.

$$\text{JADK} = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

---

## Jumlah seluruh anggota dewan komisaris

### c. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Tingkat pengungkapan wajib sangat di pengaruhi oleh jumlah rapat dewan komisaris. Jika jumlah rapat dewan komisaris setiap periodenya sedikit maka akan berdampak pada berkurangnya pengawasan dan pelaporan atas pengungkapan *mandatory disclosure*. Jumlah rapat dewan komisaris dalam penelitian ini di ukur dengan menjumlah seluruh rapat yang diselenggarakan selama satu periode.

### d. Latar belakang dewan komisaris

Pada penelitian ini mengukur latarbelakang pendidikan komisaris dengan melihat profil perusahaan pada laporan keuangan apakah dalam suatu perusahaan dewan komisaris memiliki latarbelakang yang baik atau tidak.

### e. Jumlah anggota komite audit

Pada penelitian ini indikator untuk mengukur jumlah anggota komite audit sesuai dengan penelitian Zaluki dan Hussin (dikutip oleh Prawinandi et al., 2012) yaitu jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.

### f. Jumlah Rapat Komite Audit

Pertemuan komite audit adalah tempat bagi direksi untuk membahas proses pelaporan keuangan dan itu adalah tempat di mana proses pengawasan pelaporan keuangan terjadi (Nor et al., 2010). Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur jumlah

rapat komite audit yang digunakan yaitu jumlah rapat komite audit yang diselenggarakan dalam jangka waktu satu tahun.

## **E. Uji Kualitas Instrumen dan Data**

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan hanya untuk penyajian dan penganalisisan data yang disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan pengukuran mean, standar deviasi, maksimum, dan minimum.

#### a. Uji Asumsi Klasik

##### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Pengambilan keputusan data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal dengan melihat nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitasnya  $> 5\%$  maka data berdistribusi normal.

##### 2) Uji Multikolonieritas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2011). Toleransi value VIF (variance inflation factor) digunakan untuk melakukan uji multikolonieritas. Jika hasilnya menunjukkan bahwa tolerance value  $> 0,1$  dan  $VIF < 10$  maka tidak terjadi multikolonieritas.

##### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

#### 4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam penelitian ini uji Durbin Watson digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam model analisis regresi

## 2. Uji Hipotesis

### a. Analisis Regresi

Pengujian Hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda karena menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat SPSS 12. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu jumlah anggota dewan komisaris, komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan komite audit independen, terhadap variabel dependen tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{MANDSCR} = \alpha_0 + \beta_1 \text{DWNKOM} + \beta_2 \text{KOMIND} + \beta_3 \text{RPTDWN} + \beta_4 \text{LTRBLK} + \beta_5 \text{KMTAUD} + \beta_6 \text{RPTAUD} + e$$

Keterangan:

MANDSC	: Pengungkapan wajib konvergensi IFRS
DWNKOM	: Jumlah anggota Dewan Komisaris
KOMIND	: Proporsi Komisaris Independen
RPTDWN	: Jumlah Rapat Dewan Komisaris
LTRBLK	: Latar Belakang Dewan Komisaris
KMTAUD	: Jumlah Anggota Komite Audit
RPTAUD	: Jumlah Rapat Komite Audit
$\alpha_0$	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_8$	: Koefisien Regresi
e	: error

b. Uji signifikansi parameter individual (uji t)

Uji statistic t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2007). Hipotesis diterima jika: Nilai sig <  $\alpha$  (alpha), Koefisien regresi searah dengan hipotesis.

c. Koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*)

Uji koefisien determinasi yaitu untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *Adjusted R<sup>2</sup>*, dimana untuk menginterpretasikan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah dalam bentuk persentase (Ghozali, 2011). Kemudian sisanya (100% - persentase koefisien determinasi) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Uji Normalitas Data

Dalam penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Tabel 4.3  
Hasil Uji Asumsi Klasik

		Unstandardized Residual
N		196
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.64695921
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.037
Kolmogorov-Smirnov Z		1.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.182

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil yang didapat pengaruh struktur korporate governance terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS dengan menggunakan uji sample *One sample Kolmogorov smirnov test*, Nilai sig  $0,182 > 0.5$  maka data dinyatakan data berdistribusi normal dengan standar deviasi 4,64695921.

#### B. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika hasilnya menunjukkan bahwa tolerance value  $> 0,1$  dan VIF  $< 10$  maka tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolonieritas.

**Coefficients<sup>a</sup>**

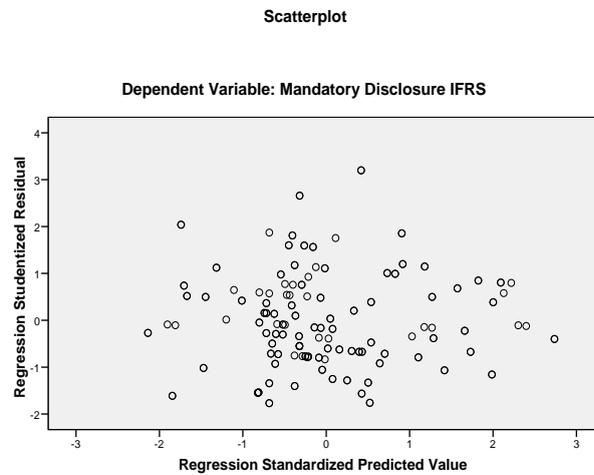
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	30.792	2.458		12.529	.000	
	Jumlah Anggota Dewan Komisaris	-.069	.367	-.021	-.189	.851	.400
	Proporsi Komisaris Independent	.222	.652	.038	.341	.734	.425
	Jumlah Rapat Dewan Komisaris	.026	.131	.014	.197	.844	.964
	Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris	-1.709	1.281	-.097	-1.334	.184	.979
	Jumlah Anggota Komite Audit	.891	.684	.100	1.302	.195	.882
	Jumlah Rapat Rapat Komite Audit	.145	.143	.074	1.011	.313	.964

a. Dependent Variable: Mandatory Disclosure IFRS

Dari hasil kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa dari semua variabel memiliki tolerance value  $> 0,1$  dan VIF  $< 10$  maka semua variabel tidak terjadi multikolonieritas.

**C. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaa variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah apabila hasilnya tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya.



Gambar 4.2

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dititik 0 antara -2 sampai dengan 3 dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### **D. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ . Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autorelasi (Ghozali, 2011). Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan uji *Durbin – Watson*.

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.155 <sup>a</sup>	.024	-.007	4.72014	1.910

a. Predictors: (Constant), Jumlah Rapat Rapat Komite Audit, Jumlah Anggota Komite Audit, Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independent, Jumlah Anggota Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: Mandatory Disclosure IFRS

Berdasarkan hasil pengujian terdapat pada gambar diatas dapat dilihat nilai Durbin-waston sebesar 1,910 dan nilai dw harus diantara (4-du) dan (4-dl). Dengan melihat perhitungan tersebut maka (4-du) yaitu 1,908 dan (4-dl) yaitu 1,911. Berarti disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

**E. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)**

Dari berbagai hasil dengan alat uji yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa data normal, tidak terjadi Multikolonieritas, tidak terjadi heterokedastisitas dan tidak terjadi autokolerasi, maka dapat dikatakan normal dan menghasilkan persamaan regresi :

Persamaan Regresi :

$$Y = 30,792 - 0,69X1 + 0,222X2 + 0,26X3 - 1,709X4 + 0,891X5 + 0,145X6 + e$$

Keterangan dapat dilihat dari nilai B pada tabel *Unstandardized Coefficients*, yaitu :

- Y : Mandatory Disclosure IFRS
- X1 : Jumlah anggota Dewan Komisaris
- X2 : Proporsi Komisaris Independen
- X3 : Jumlah Rapat Dewan Komisaris
- X4 : Latar Belakang Dewan Komisaris
- X5 : Jumlah Anggota Komite Audit

X6 : Jumlah Rapat Komite Audit  
 30,792 : Konstanta  
 - 0,60, 0,222, 0,26, - 1,709, 0,891, 0,145 : Koefisien Regresi  
 e : error

**F. Uji Parsial (Uji t)**

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Jika nilai Sig < 0,05 Maka Hipotesis akan diterima. Uji parsial ditentukan dengan melihat tabel 8 dilihat dari nilai signifikan bahwa semua hipotesis memiliki nilai sig > 0,05 maka semua hipotesis dinyatakan ditolak.

**G. Uji Simultan (Uji F)**

Uji simultan biasa disebut juga dengan uji nilai F. Uji F dikatakan diterima jika nilai sig < 0.05 dari keseluruhan variabel bebas pada terikat.

Tabel 4.7

Hasil Uji Simultan

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	103.758	6	17.293	.776	.590 <sup>a</sup>
	Residual	4210.875	189	22.280		
	Total	4314.633	195			

a. Predictors: (Constant), Jumlah Rapat Rapat Komite Audit, Jumlah Anggota Komite Audit, Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independent, Jumlah Anggota Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: Mandatory Disclosure IFRS

Dari hasil data tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai sig sebesar 0,590 > 0,05 maka Ha ditolak.

## H. Koefisien determinasi (R square)

Koefisien determinasi (R square) dapat dilihat dari seberapa persen variabel bebas pada variabel terikat. Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *Adjusted R<sup>2</sup>*, dimana untuk menginterpretasikan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah dalam bentuk persentase (Ghozali, 2007). Kemudian sisanya (100% - persentase koefisien determinasi) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

Tabel 4.8

Tabel Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.155 <sup>a</sup>	.024	-.007	4.72014	1.910

a. Predictors: (Constant), Jumlah Rapat Rapat Komite Audit, Jumlah Anggota Komite Audit, Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independent, Jumlah Anggota Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: Mandatory Disclosure IFRS

Dari Tabel terlihat tampilan output SPSS model *Summary* besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,024. Hal ini berarti hanya 2,40 % persen konvergensi IFRS (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel - variabel independen yaitu jumlah anggota dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, latar belakang dewan komisaris, jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit. Sedangkan sisanya (100% - 2,40% = 97,6%) dijelaskan oleh sebab-sebab lainnya di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## I. Pembahasan

Hasil menunjukkan bahwa rerata tingkat mandatory disclosure konvergensi IFRS adalah sebesar 2,40%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS pada perusahaan manufaktur di Indonesia masih sangat rendah dengan yang disyaratkan, mengingat pengungkapan wajib telah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. X.K.6 KEP-134/BL/2006 Tanggal 07 Desember 2006 sehingga perusahaan wajib mengungkapkan 100,000%.

Jumlah dewan komisaris memiliki *p-value* 0,851 sebesar pada lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap tingkat mandatory disclosure konvergensi IFRS. Hasil uji regresi ini tidak sesuai dengan hipotesis sehingga hipotesis pertama ditolak. Semakin sedikitnya jumlah anggota dewan komisaris tindak kecurangan akan semakin besar dan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS, karena besarnya jumlah anggota dewan komisaris memungkinkan perusahaan tidak didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. Penelitian ini didukung oleh penelitian Utami et al. (2012) menunjukkan bahwa, Besarnya jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

Proporsi dewan komisaris independen memiliki *p-value* 0,222 sebesar 0,734 lebih besar dari 0,05 dan memiliki koefisien sebesar. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan hipotesis sehingga hipotesis kedua ditolak. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Sutedi, (2011). Ketentuan minimum dewan komisaris independen sebesar 30,000% belum cukup tinggi untuk membuat komisaris independen tersebut mendominasi kebijakan

yang diambil oleh dewan komisaris. Jika komisaris independen merupakan pihak mayoritas (>50,000%) mungkin dapat lebih efektif dalam memonitor perusahaan (Siregar dan Utama, 2006).

Jumlah rapat dewan komisaris memiliki *p-value* 0,844 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS sehingga hipotesis ketiga ditolak. Jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Penelitian ini didukung oleh Muntoro, (2006) berpendapat bahwa kurangnya tingkat pengambilan keputusan jumlah rapat dewan komisaris terjadi karena seringkali terdapat seorang atau lebih komisaris yang mendominasi jalannya rapat dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan, padahal proses rapat sangat penting dalam menentukan efektivitas dewan komisaris.

Latar belakang pendidikan dewan komisaris memiliki *p-value* sebesar 0,184 lebih besar dari 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS, maka hipotesis keempat ditolak. Komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis yang rendah dapat mempengaruhi tingkat pengambilan keputusan bisnis dan pengelolaan perusahaan terhadap peningkatan kepatuhan *mandatory disclosure* Konfegensi IFRS.

Jumlah anggota komite audit memiliki *p-value* sebesar 0,195 lebih besar dari 0,05 dan koefisien dari 0,891. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, maka hipotesis kelima ditolak. Banyaknya jumlah komite audit yang bertugas menelaah kebijakan

akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan, sehingga kurang efesienya pengambilan keputusan bisnis dan juga dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Jumlah rapat komite audit memiliki *p-value* sebesar 0,313 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keenam ditolak. Penelitian ini didukung oleh penelitian Pamudji dan Trihartati, (2010), menjelaskan bahwa jumlah rapat komite audit dalam perusahaan hanya bersifat *mandatory* terhadap peraturan yang ada, terdapat kemungkinan bahwa rapat/pertemuan komite audit jarang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan pihak manajemen maupun auditor eksternal sehingga masalah-masalah yang terdapat dalam proses pelaporan keuangan tidak terungkap dan tidak diketahui oleh komite audit.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa dari semua variabel bebas yaitu jumlah dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, latar belakang dewan komisaris, jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

1. Hasil penelitian menunjukkan dari 120 sampel perusahaan tingkat pengungkapan wajib IFRS sebesar 2,40%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS di Indonesia masih kurang, hal ini mengidentifikasi bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) belum memiliki tingkat kepatuhan pengungkapan wajib berdasarkan ceklist PWC tahun 2013.

2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* secara keseluruhan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS yaitu jumlah anggota dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan dewan komisaris, jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang diberikan oleh peneliti terhadap penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya menambahkan ukuran perusahaan, penetapan periode pengamatan berdasarkan tahun penelitian.
2. Penelitian berikutnya sebaiknya melakukan review lebih lanjut terhadap IFRS dan diverifikasi oleh pihak yang lebih berkompeten.

## **C. Keterbatasan Penelitian**

1. Dasar pengidentifikasian item pengungkapan wajib IFRS menggunakan *checklist* dari PWC 2013 yang masih baru bagi orang yang mau meneliti dan belum spesifik sehingga harus mengidentifikasi terlebih dahulu item mana saja yang bersifat *mandatory* dan mana yang bersifat *voluntary*.
2. Hasil penelitian ini belum dikatakan berhasil makan untuk penelitian berikutnya dapat melakukan riset pengamatan berdasarkan periode setelah ditetapkannya standar akuntansi berbasis IFRS karena untuk melihat kondisi yang sedang berlangsung maka akan menyempurnakan hasil penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Akra, et al., 2010, “*The Influence of The Introduction of Accounting Disclosure Regulation on Mandatory Disclosure Compliance*”, Evidence from Jordan. *The British Accounting Review*(42) : 170–186.
- Cooke, T.E., 1992, “*The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed Corporations*”. *Accounting and Business Research* 22 (87): 229-237.
- Financial Accounting Standards Board (FASB), 1980, *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.2: Qualitative Characteristics of Accounting Information*.
- Gamayuni, Rindu Rika, 2009, *Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju International Financial Reporting Standards*. Lampung.
- Ghozali, I, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Fitri, 2011, “Hubungan antara karakteristik *Corporate governance* dan Pengungkapan tanggung jawab Sosial perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan *High Profile* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”, *Skripsi*. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Meek, G.K., et al, 1995, “*Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by US, UK and Continental European Multinational Corporations*”. *Journal of International Business Studies* 26: 555-572.
- Mensah, B.K.A, 2011, “*The Impact Of Adopting International Accounting Standards 1 (IAS 1) in Ghana: The Extent Of Disclosures, and Their Relationship to Corporate Characteristics*”. Swiss Management Center University Working Paper.
- Muller, E.J et al, 2008, “*Consequences of Voluntary and Mandatory Fair Value Accounting: Evidence Surrounding IFRS Adoption in the EU Real Estate Industry*”. Harvard Business School Working Paper 09-033.
- Muntoro, R.K., 2006, “Membangun Dewan Komisaris Yang Efektif. Artikel Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia”. <http://www.lmfeui.com/data/detail> Membangun Dewan Komisaris yang efektif. Diakses 22 November 2014 jam 13.30 wib.
- Novita, Retna Sari., 2013, “Peran Struktur *Corporate Governance* Dalam Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode (2004 – 2006), *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Pamudji, S., dan A. Trihartati., 2010, “Pengaruh Independensi dan Efektifitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”. Artikel Universitas Diponegoro Semarang, [ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/download/176/105](http://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/download/176/105). Diakses 9 Oktober 2014 jam 17.00 wib

Pitasari, Anggita., 2013, “Analisis Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS Pada Laporan Laba Rugi Komprehensif”, *Skripsi*. Semarang, Universitas Diponegoro.

Prawinandi, W., dan Suhardjanto, D., 2012, “Peran struktur *corporate governance* dalam tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi ifrs” *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV*, Aceh.

Renders, A., dan A. Gaeremynck., 2005, “Legal and Voluntary Investor Protection and Early”, Yordania.

Siregar, S.V., dan S. Utama., 2006, Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Praktek *Corporate Governance* terhadap Pengelolaan Laba (*Earnings Management*). *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 9 (3): 307-326.

Suwardjanto, Djoko., 2010, “Peran *Corporate Governance* Dalam Praktik Risk Disclosure Pada Perbankan Indonesia” *Journal of Accounting Research*.

Utami, dan Rahmawati, 2008, “Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit Terhadap Aktifitas Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta”, *Makalah Simposium Nasional Akuntansi*, Yogyakarta.

Utami, dkk, 2012, “ Investigasi Dalam Konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dan Kaitannya Dengan Mekanisme *Corporate Governance*,” *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV*, Aceh.

Waryanto, 2010, “Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia” *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.

